

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 4



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Poskota.co
Media Cetak	

Jaga Ketahanan Pangan Jakarta, DPRD Usul Pemprov DKI Beli Lahan Pertanian di Luar Daerah

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menjajaki rencana pembelian lahan sawah atau ladang di luar daerah. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mana selama ini Jakarta sangat tergantung pada daerah produsen.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, salah satu upaya menjaga ketahanan pangan di Jakarta dapat dilakukan dengan membeli tanah di daerah lain untuk dijadikan lahan pertanian. Dengan kepemilikan lahan sendiri, Pemprov bisa menanam jenis beras atau aneka sayuran sesuai kebutuhan.

“Setelah membeli sawah atau ladang, entah itu di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau lainnya, kemudian, Pemprov DKI bisa menjalin kerja sama dengan banyak petani dan mitra di daerah melalui penyediaan bibit dan pupuk untuk memproduksi komoditas pangan,” kata Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Menurutnya, saat ini di berbagai daerah masih banyak petani yang siap diajak kerja sama. “Di sana ada yang bertani dan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, kita bisa mendapatkan harga lebih murah dan terjangkau,” terang Khoirudin.

Untuk kajian rencana pengadaan lahan pertanian di luar daerah, kata Khoirudin, pihaknya sudah melakukan pembahasan terkait ketahanan pangan bersama Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati. “Tujuannya agar kebutuhan pangan penduduk Jakarta yang mencapai 10,8 juta orang bisa terpenuhi dengan baik,” tandasnya.

Khoirudin sudah berdialog dengan Sri Haryati bagaimana menjaga ketahanan pangan Jakarta. Sebab, Jakarta memiliki keterbatasan lahan untuk pertanian. “Sebaiknya, Pemprov DKI membeli lahan pertanian di sejumlah daerah,” sarannya.

Pada kesempatan itu, Khoirudin juga mengingatkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) klaster pangan untuk menjaga suplai atau pasokan sembako menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Melalui upaya ini kita ingin memastikan pasokan pangan di Jakarta terjamin dan tidak terjadi lonjakan harga,” pungkasnya. (jo)